



Dewan Pimpinan Nasional



Permata Kuningan Lantai 10

Jl. Kuningan Mulia Kav.9C

Guntur-Setiabudi, Jakarta 12980

Telp: 021 8378 0824 (Hunting)

Fax: 021 8378 0823 / 8378 0746

Email: sekretariat@apindo.or.id

YOUR BUSINESS PARTNER IN INDONESIA

Sinergi Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha, penelitian harus diarahkan bagi pemenuhan kebutuhan industri

Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha harus membangun kerjasama yang baik. Penelitian yang dilakukan harus semakin diarahkan bagi pemenuhan kebutuhan industri. Kedua belah pihak perlu menggabungkan kekuatan ini dengan melakukan penelitian implementatif sehingga hasil riset tersebut dapat dimanfaatkan oleh dunia industri.

Demikian disampaikan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, di Istana Wakil Presiden, pada Rabu (21/1/2015).

Terdapat dua rangkaian acara terkait penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan APINDO serta Perjanjian Kerjasama antara APINDO dengan Forum Rektor Indonesia.

Tujuan dari adanya Nota Kesepahaman ini adalah meningkatkan sinergi antara Dunia Usaha/ Dunia Industri dengan Perguruan Tinggi melalui peningkatan dan pengembangan SDM, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha.

Acara penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama ini dihadiri sejumlah pihak, termasuk para pimpinan

APINDO Provinsi seluruh Indonesia yang sedang mengadakan Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) APINDO ke-26 dan berlangsung hingga Kamis (22/1/2015).

“Indonesia menghasilkan sekitar satu juta alumni tiap tahunnya. Kemana alumni Perguruan Tinggi diharapkan? Kita tahu kebijakan moratorium lima tahun yang akan datang, tidak ada PNS baru kecuali untuk guru, dokter, dan teknis. Mereka harus ada di sektor swasta atau entrepreneur, menjadi profesional atau pengusaha,”

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla

Sementara itu, Ketua Umum DPN APINDO, Hariyadi B. Sukamdani menyampaikan tiga hal dalam acara ini, yaitu adanya kesulitan yang dialami perusahaan-perusahaan di APINDO dari berbagai sektor untuk mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi pekerjaan yang diperlukan.

"Dari para pakar kami mendengar tentang lemahnya *link and match* antara lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia usaha atau industri. Banyak pengamat menyatakan bahwa pengetahuan dan keterampilan teknis yang dihasilkan dunia pendidikan kurang memenuhi kualifikasi industri," ujarnya.

Namun demikian, Hariyadi mengatakan lebih lanjut persoalan *soft-skills* seperti kedisiplinan, kerjasama, etos kerja, dan lain lain, bahkan lebih penting daripada *technical-skills*. Industri tentu tidak bisa mengabaikan *technical-skills* namun pada kenyataannya

soft-skills sangat menentukan kinerja perusahaan. Maka dalam kurikulum pendidikan, *soft-skills* mestinya menjadi satu kesatuan yang dikembangkan melengkapi *technical-skills*".

Selain itu, Ia juga mengatakan dunia usaha memerlukan institusi independen dengan kemampuan penelitian yang handal untuk berbagai hal. "Selama bertahun-tahun pelaksanaan survei yang dilakukan untuk menentukan besaran Upah Minimum bisa dikatakan selalu terjadi dispute antar ketiga unsur tri-partite tersebut. Maka kami memandang sangat tepat jika perguruan tinggi menjadi pihak independen yang dapat melaksanakan survei tersebut secara obyektif dan profesional," urai Hariyadi.

Bagi Ketua Forum Rektor Indonesia, Ravik Karsidi, wacana proses untuk mengintegrasikan antara universitas, industri, dan pemerintah sudah cukup lama didengungkan pada masa lalu dan menjadi intensif selama menjelang pergantian kabinet pada tahun lalu.

Ia menambahkan, dengan lahirnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, era baru pendidikan tinggi tengah dimulai. Hal ini dapat dianggap sebagai Paradigma baru Pendidikan Tinggi Indonesia yang mengusung perlunya integrasi universitas, industri dan pemerintah. "Dalam paradigma baru tersebut, universitas atau Perguruan Tinggi harus dapat bersinergi dengan industri dan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," urainya.

Ravik memaparkan, Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat benar-benar bersinergi secara dinamis dengan kepentingan industri dan pemerintah. "Tanda atas usaha sinergi langkah ini adalah diandatanganinya Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antar unsur pemerintah dalam hal ini Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi yang akan

diwakili Forum Rektor Indonesia, dan Pengusaha yang diwakili APINDO," terang Ravik.

Dalam sambutannya, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Muhammad Nasir menegaskan jika negara maju selalu didukung sumber daya manusia yang kuat dan kokoh. Oleh karenanya, diperlukan kolaborasi dengan pihak terkait dengan peran serta masyarakat untuk membangun kompetensi SDM. "Mempertemukan hasil penelitian dengan kebutuhan industri menjadi tugas semua pihak, tidak hanya tugas pemerintah, namun juga inisiatif Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha," paparnya.

Untuk mengimplementasikan kerjasama tersebut, Forum Rektor Indonesia diharapkan dapat mengkoordinasikan Perguruan Tinggi yang bersangkutan untuk dapat bekerjasama dengan APINDO Nasional atau APINDO Provinsi maupun perusahaan anggota APINDO.

Sementara itu, dalam Nota Kesepahaman antara APINDO dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha, Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- Pemagangan kerja bagi mahasiswa dan lulusan Perguruan Tinggi untuk bidang-bidang keilmuan yang relevan
- Penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian
- Pelatihan dan jasa konsultasi
- Pengabdian kepada masyarakat
- Pertukaran informasi tentang ketersediaan dan kebutuhan SDM pada dunia usaha

Forum bisnis Indonesia – Jepang gali peluang investasi dan perdagangan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi

Forum bisnis antara Indonesia dan Jepang dimanfaatkan untuk menggali peluang investasi dan perdagangan demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Demikian disampaikan Ketua APINDO bidang Hubungan Internasional & Investasi, Shinta Widjaja Kamdani, dalam Indonesia – Japan Economic Dialogue, Senin (2/2/105). Forum bisnis ini dihadiri oleh Chairman The Japan Chamber of Commerce and Industry (JCCI) Dr. Akio Mimura dan sejumlah perwakilan dari KADIN serta instansi pemerintah.

Menurut Shinta, adanya dialog perekonomian Indonesia dan Jepang menunjukkan ada kepentingan besar dari sektor swasta antara kedua negara dalam meningkatkan dan memperkuat



kerjasama lebih lanjut, dimana ada kepentingan bersama untuk mendorong perdagangan dan investasi antar dua negara,

termasuk dalam mengeksplorasi peluang bisnis yang belum dimanfaatkan.

“Pemerintah perlu mengambil peran sebagai fasilitator dan mendengarkan suara dari para pebisnis, serta sebaiknya juga memfasilitasi pergerakan perdagangan dan investasi yang dapat meningkatkan kerjasama dan transparansi dalam berbagai bidang,” terangnya.

Oleh karenanya, dialog forum bisnis perlu dimaksimalkan untuk memberikan kontribusi yang menguntungkan komunitas bisnis dalam bertukar pandangan, pemikiran, informasi, dan pengalaman dalam mendukung hubungan antara Indonesia dan Jepang.

“Kami ingin melihat kerjasama perdagangan dan investasi yang semakin aktif antara pemain baru asal Jepang di Indonesia. Hal ini ditujukan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing bagi industri dan produk Indonesia,” ujar Shinta.

Shinta memaparkan bahwa Presiden RI, Joko Widodo telah meresmikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Presiden menginstruksikan kepada para investor yang mengurus perijinan, tak perlu lagi mendatangi berbagai kementerian atau lembaga, cukup datang ke PTSP di BKPM.

Adanya integrasi perijinan pada PTSP diharapkan menjadi batu loncatan bagi pembangunan di Indonesia. “Ini adalah contoh yang baik dimana pelayanan publik menjadi mudah dan tidak rumit. Pemerintah harus memiliki komitmen untuk meningkatkan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi,” paparnya.

“Berdasarkan data BKPM, jumlah investasi asing di Indonesia sejak Januari hingga September 2014 mencapai 21,7 milyar dolar AS. Jepang adalah investor terbesar kedua di Indonesia setelah Singapura dengan total investasi mencapai 2,1 milyar dolar AS. Dengan demikian, Jepang dan Indonesia merupakan partner yang strategis,”

**Ketua APINDO Bidang Hubungan Internasional,
Shinta W. Kamdani**

Mengintensifkan kerjasama antara organisasi bisnis dari masing – masing negara juga perlu dilakukan. Hal ini dengan mempertimbangkan bahwa mereka mewakili sejumlah anggota perusahaan dari berbagai sektor untuk menyediakan lebih banyak lagi peluang yang dapat digali. “Kami berharap forum ini juga dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan yang lebih luas, misalnya UKM,” tutur Shinta.

Pada kesempatan yang sama, Ketua APINDO bidang Perhubungan dan ESDM, Soebronto Laras juga memaparkan terkait Sumber Daya Manusia di Indonesia. Menurutnya, Indonesia memiliki hampir 250 juta penduduk dan 70% dari total populasi tersebut merupakan golongan usia produktif. Meskipun demikian, Indonesia masih memiliki beberapa tantangan terkait situasi kerja saat ini, dimana masih banyak tenaga kerja informal dan berpenghasilan sekitar satu hingga dua dolar AS.

Soebronto mengungkapkan bahwa tenaga kerja tersebut bisa menjadi tenaga kerja terampil melalui keikutsertaan mereka dalam pelatihan. Selain itu, Indonesia juga telah mengadopsi sistem pendidikan yang mampu menciptakan tenaga kerja terampil dan terdidik dan hal ini sangat menguntungkan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

“Tenaga kerja memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi MEA nantinya. Hal ini lantaran MEA tidak hanya membuka arus perdagangan barang, namun juga pergerakan tenaga kerja terampil,” urainya.

Dengan adanya beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia terkait sumber daya manusia, Soebronto mengungkapkan optimismenya dengan adanya:

- Komitmen pemerintah baru dalam membentuk Dana Pengembangan Sumber Daya Manusia di Indonesia untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia.
- Tim ekonomi dan profesional solid diantara Kabinet yang memfokuskan pada peningkatan bisnis dan iklim investasi melalui kebijakan yang menguntungkan bagi dunia usaha.
- Kesepahaman antara APINDO dengan Menteri Tenaga Kerja terkait kebijakan upah sebagai *safety net* bagi kemampuan daya beli pekerja dan memiliki pertimbangan dimana perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar, khususnya bagi pekerja padat karya.
- APINDO secara berkelanjutan mempertahankan dialog sosial dengan serikat pekerja di semua level (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota) dan memiliki hubungan kerja yang baik dengan tiga dari empat serikat pekerja terbesar di Indonesia.

Peran strategis Rakerkonas terkait momentum pemerintahan baru dan dinamika saat ini



Rakerkonas mempunyai peran sangat strategis terkait momentum pemerintahan baru dan juga melihat dinamika saat ini. Ketua Umum APINDO, Hariyadi B. Sukamdani menyampaikan hal tersebut dalam Pembukaan Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) APINDO ke-26 pada Selasa (20/1/2015).

Menurut Hariyadi, Rakerkonas tahun ini mengangkat tema masalah pengupahan. "Pengupahan yang kita alami dalam waktu 20 tahun terakhir, maka yang kita lihat sebetulnya kebijakan yang tidak bisa sepenuhnya dapat diimplementasikan sesuai dengan apa yang digariskan Undang-Undang. Oleh karena itu, pada rakerkonas kali ini kita ingin bahas secara tuntas untuk menyamakan persepsi bagaimana kita mengantisipasi menyangkut masalah pengupahan," ujarnya.

Ia menambahkan jika masalah pengupahan tidak semata-mata hanya bicara penentuan besaran upah, namun justru yang melekat di dalam upah itu banyak yang menyertai, yaitu antara lain penghitungan jaminan sosial baik BPJS kesehatan maupun BPJS tenaga kerja yang semuanya menyangkut prosentase terhadap upah.

Rakerkonas ke-26 yang diselenggarakan hingga Kamis (22/1/2015) dihadiri Ketua APINDO Daerah dari 33 Provinsi di seluruh Indonesia dengan mengangkat tema "Mewujudkan Kebijakan dan Kelembagaan Pengupahan Berkualitas Untuk Peningkatan Produktivitas".

Rakerkonas diisi dengan Pembekalan dan Dialog Interaktif ini merupakan forum koordinasi antara Kepengurusan APINDO secara Nasional dengan Kepengurusan APINDO Provinsi dan diharapkan menjadi sarana dalam mencari solusi terhadap berbagai dinamika yang berlangsung dalam bidang investasi,

perdagangan, dan ketenagakerjaan sehingga mampu memberi landasan kuat bagi struktur makroekonomi Indonesia ke depannya.

Tahun ini, Rakerkonas APINDO mengangkat tema Dialog Interaktif dalam Rakerkonas akan membahas tiga tema yang terkait Pengupahan dan Kemampuan Daya Dukung Perekonomian, Ekonomi dan Iklim Investasi, dan Sistem Penerapan Upah.

Tantangan di bidang investasi dan perdagangan, ketenagakerjaan dan pengupahan, serta dinamika dunia usaha saat ini disadari membawa implikasi terhadap perkembangan dunia usaha dalam negeri, dinamikan investasi, dan tingkat kesejahteraan pekerja secara keseluruhan.

Dalam sambutannya, Ketua APINDO Anthony Hilman mengatakan Rakerkonas diisi dengan rapat konsultasi yang didahului dengan rapat koordinasi tentang pengupahan. Selain itu, para ketua DPP APINDO seluruh Indonesia juga hadir dalam penandatanganan MOU antara APINDO, Forum Rektor Indonesia, dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. "Penandatanganan MOU ini ditujukan bagi mahasiswa yang ingin magang di perusahaan. Hal ini merupakan sumbangsih APINDO bagi bangsa dan negara," papar Anthony.

Selain menghadiri penandatanganan MOU dengan Wakil Presiden RI dan menghadiri dialog interaktif dengan sejumlah menteri, Kepala BKPM, para peserta melakukan Rakerkonas pengupahan untuk membuat kesepakatan nasional. "Sikap APINDO terhadap mekanisme penetapan Upah Minimum untuk tahun-tahun berikutnya agar ada keseragaman langkah dan gerak APINDO secara nasional," urai Anthony.

Pemberian pembekalan Rakerkonas APINDO ke-26 ini diharapkan memberikan wawasan bagi para peserta terkait pengembangan produktivitas berbasis *knowledge-base* melalui peningkatan keterampilan dan kompetensi. Rakerkonas ini juga menjadi ajang dalam menyuarakan harapan peserta kalangan Dunia Usaha kepada pemerintah mengenai perkembangan paradigma baru beserta harapan ke depannya.